



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 921/IV/VIII/2016

**Berantas Kemiskinan
Tingkatkan Pembangunan**

**Presiden Jokowi Apresiasi
Kinerja DPR RI**

**Upacara HUT RI Sekjen DPR RI
Tekankan Kedisiplinan Pegawai**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Berantas Kemiskinan, Tingkatkan Pembangunan

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2016 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengucapkan terima kasih kepada para pejuang kemerdekaan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Generasi selanjutnya harus meneruskan perjuangan mereka sesuai cita-cita luhur yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa.

Ade Komarudin menegaskan, kemiskinan dan ketimpangan musti diberantas, pembangunan dan pendidikan harus ditingkatkan.

"Kemiskinan harus diberantas, ketimpangan harus dikurangi, dan pembangunan infrastruktur, peningkatan dunia pendidikan dan lainnya harus terus digalakkan. Memperbaiki kekurangan yang ada dengan kerja sama, serta partisipasi dan do'a dari seluruh rakyat Indonesia, agar pemerintahan yang ada sekarang berhasil memajukan Indonesia menjadi negeri yang dibanggakan," tandasnya.

Sidang Bersama dalam rangkaian HUT RI ke-71 dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta para Dubes negara sahabat, Ketua DPR RI juga mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, toleran,

damai, dengan cita-cita besar dalam meraih kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme sempit yang tertutup, kita bangsa majemuk yang terbuka, demokratis, dan ingin memberi sumbangsih positif bagi perdamaian dunia," papar Ade Komarudin.

Saat ini bangunan peradaban demokrasi di Indonesia semakin kokoh berdiri, dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif semakin meningkat.

"Jangan membiasakan diri mempromosikan konflik, tetapi harus mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan yang ada. Masih banyak yang dapat ditingkatkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga lainnya," pungkasnya. ■

DPR RI dan Menkumham Tingkatkan Kualitas dan Produktifitas Undang-undang

Dalam seminar yang bertajuk 'Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan,' Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap ada peningkatan kualitas dan produktifitas dalam perancangan undang-undang. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM.

“ Dengan seminar ini dan MoU tadi, kita harap kualitas dan produktifitas undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang sesuai dengan fungsi legislasinya," harap Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI, saat memberi sambutan pembuka di seminar tersebut, Kamis petang (11/8).

Akom mengungkapkan, dalam penyusunan undang-undang, mitra utama DPR RI adalah Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, setelah acara seminar resmi dibuka, ada *memorandum of understanding* (MoU) antara kedua institusi tersebut sebagai komitmen untuk peningkatan kualitas perancangan undang-undang.

Akom juga memaparkan, kedepan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB tentang perekrutan SDM baru untuk menopang kinerja perumusan undang-undang. Selain itu juga akan dibahas soal apresiasi kepada para perancang teknis undang-undang. "Jadi tenaga fungsional itu juga dihargai keahliannya," ujar Akom.



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Kemenkumham dan Kepala Badan Keahlian DPR RI

Akom menjelaskan dalam teknis penyusunan undang-undang akan disesuaikan dengan latar belakang yang bersangkutan. Ada kebutuhan teknis dalam penyusunan draf teknis akademis. Menurut Akom, pekerjaan ini memerlukan orang yang memiliki keahlian mumpuni.

"Ada ahli hukum yang menggeluti IT, ada ahli hukum yang menggeluti UMKM, kemudian ada yang menggeluti tata negara, yang menggeluti politik. Itu harus lengkap di dewan. Kalau kuantitasnya terbatas tentu tidak maksimal, produktifitasnya juga akan rendah karena perancangannya sedikit," jelas Akom.

Akom mengatakan kegiatan seperti ini, harus jadi tradisi dua institusi negara

DPR RI dan Menkumham. Dua institusi ini bisa berbagi tugas untuk memaksimalkan kinerja. Dia juga akan memastikan tenaga ahli harus mampu merumuskan undang-undang yang berkualitas.

"Presiden berharap DPR RI dan perumus tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Seminar ini harus menjawab tantangan itu," imbuh Akom.

Senada dengan

Akom, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, penguatan peran perancang perundang-undangan memerlukan keseriusan. Karena dalam teks undang-undang harus mengandung kualitas keadilan, manfaat, dan berpihak pada rakyat. Menurutnya prinsip ini, sesuai dengan amanat pemerintah.

Yasona juga mengupayakan akan memberikan perhatian kepada para tenaga perancang undang-undang. Salah satunya akan memberikan fasilitas pendidikan kepada para perancang undang-undang. "Tenaga perancang diberikan kesempatan untuk belajar di luar negeri," ujarnya. ■

(foto: Naefuroji/br)



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Ketua DPR RI Usulkan Aturan Perlindungan untuk Guru

Ketua DPR RI Ade Komarudin menanggapi kasus kekerasan kepada guru oleh orang tua murid yang terjadi di Makassar dengan mengusulkan agar ada peraturan yang jelas dan tegas dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dalam melindungi guru.

“ Saya kira Kemendikbud harus buat peraturan untuk melindungi guru, sekaligus juga batasan secara teknis kewenangan mereka sampai di mana, supaya tidak terulang kembali seperti sekarang ini,” usul Akom sapaan akrab Ketua DPR RI di Hotel Royal Kuningan, Kamis malam (11/8).

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, bahwa guru punya tugas mulia namun imbalan yang didapatkan dari negara masih belum sepadan. Selain imbalan yang tidak sepadan masih muncul permasalahan yakni tidak ada perlindungan untuk guru. “Saya ingin agar itu tidak terulang, buat peraturan menteri lah, gak usah tinggi-tinggi melindungi mereka,” ungkap Akom.

Dia menyadari posisi guru di kota-kota besar tidak terlalu mendapat tanggapan yang bagus. Sehingga pemerintah harus membuat



Ketua DPR RI Ade Komarudin

aturan yang tegas dan jelas agar guru memiliki kewenangan yang proporsional

untuk mendidik murid.

“Terus terang saja guru itu kalau di kota besar posisinya tidak terlalu memiliki kuasa dibanding anak didik, karena anak didiknya anak pejabat, pengusaha, orang kaya, dia diantarin dengan mobil yang cukup mewah. Sementara gurunya datang dengan sepeda motor. Dengan peraturan yang tegas dan jelas saya yakin dia tidak sungkan mendidik muridnya, jadi sekali lagi perlu perlindungan,” jelas Akom.

Sebagaimana diberitakan, Guru SMAN 2 Makassar bernama Dasrul dilaporkan mengalami pemukulan oleh Adnan Ahmad, orang tua siswa yang tidak terima dengan cara Dasrul mendisiplinkan anaknya di sekolah. Permasalahan bermula saat siswa tersebut tidak membuat tugas menggambar. Adnan Ahmad kemudian datang dan memukuli Dasrul hingga mengalami luka-luka dan patah di bagian ujung hidung. ■

(ekoranpi), Foto: Nagfajri/for

Pengobatan Gratis Dekatkan Dewan Dengan Masyarakat

Pada Masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menyelenggarakan pengobatan gratis di Balai Kampung Karang Geneng Utara, Kelurahan Jagalan, Kabupaten Semarang Tengah, Jawa Tengah, Sabtu (13/8). Agus mengatakan, aksi sosial seperti pengobatan gratis kali ini telah dilakukannya semenjak dirinya terpilih menjadi wakil rakyat di Senayan.

“ Untuk itu saya berharap, dalam kegiatan pengobatan gratis ini dapat melahirkan kedekatan saya dengan masyarakat dalam hal komunikasi,” jelasnya kepada pers, usai memberi sambutan dan sekaligus membuka pengobatan gratis.

Politisi F-PD itu menambahkan, dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, ia selalu memberikan hal-hal terbaik kepada masyarakat yang ada di daerah setempat, sehingga juga memberikan manfaat yang terbaik. Tentunya, kegiatan itu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Alhamdulillah, saya melihat antusias warga Semarang Tengah ini cukup besar dalam menyambut pengobatan gratis,” ujar Agus seraya menambahkan bahwa dalam

pengobatan gratis kali ini, ia tidak menyediakan pengobatan besar-besaran.

Politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu memastikan, kegiatan sebagai salah satu wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab wakil rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Selain menyelenggarakan pengobatan gratis, sebelumnya juga ia pernah memberikan bantuan tiga traktor tangan dan bibit padi sebanyak 40 ton kepada masyarakat di Kabupaten Semarang. Begitu juga dengan beasiswa telah diberikan kepada SD, SMP dan SMA yang totalnya lebih dari 40 ribu di Kabupaten Semarang



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama masyarakat

dan Kabupaten Kendal.

"Pada waktu itu memang pemerintah memberikan beasiswa baik kepada SD, SMP maupun SMA sehingga kami dapat

terkait.

"Kami berharap semoga aspirasi-aspirasi ini dapat berguna dan dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya. ■

(amb) foto: anis/fbr

Pertumbuhan Ekonomi Karena Faktor Bulan Puasa dan Lebaran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli zon menilai bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2016 ini sebesar 5,18 yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu lebih dikarenakan kondisi saat itu yang memasuki bulan puasa, dan hari raya Idul Fitri.

Hal tersebut diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan terkait pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (16/8).

"Asumsi-asumsi yang disampaikan itu sangat fantastis. Kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kemarin sebesar 5,18 persen itu karena faktor bulan puasa dan lebaran. Namun kenyataannya saya sangat yakin di bawah 5 persen. Nanti kita lihat saja rata-ratanya. Kita juga harus lihat faktor eksternal dan internal. Eksternal juga terjadi kelambatan. Kalau ada satu persen pertumbuhan ekonomi Cina, kita berarti turun 10 persen. Ini masih akrobat angka-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

angka," ujar Fadli Zon.

Meski demikian ia berharap angka-angka tersebut bisa direalisasikan. Namun pihaknya tidak yakin dengan cara bekerja

pemerintah yang salah orientasi tidak pada ekonomi rakyat, maka tahun depan hal itu tidak dapat tercapai.

Tidak hanya itu Fadli juga mempertanyakan tingkat penurunan kemiskinan sebesar 10,86 persen yang disebutkan pemerintah. Ia menilai perlu dicek kembali garis kemiskinan atau *poverty line* nya. Kemiskinan semakin bertambah. Masyarakat hidup semakin susah, dan mencari pekerjaan semakin sulit.

"Dimana menurunnya, *poverty line* nya perlu dicek lagi. Saya melihat kenyataannya kemiskinan semakin bertambah. Setiap masyarakat yang saya temui mengatakan hidup saat ini semakin susah, mencari pekerjaan semakin sulit. Coba bisnis apa yang

bagus saat ini, mulai dari manufaktur sampai retail, dan bisnis makanan semuanya susah. Dimana yang bagus?," pungkasnya. ■

(Dyo). Foto: Azka/fbr

Ketua DPR RI Hadiri 100 Tahun Zelfbestuur Indonesia

Peringatan Zelfbestuur (pemerintahan sendiri) Indonesia diperingati di Kota Bandung. Ketua DPR RI Ade Komarudin hadir dalam acara yang dihelat pada Minggu (14/8) itu. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang Bapak Bangsa HOS Tjokroaminoto di GOR C-TRA Arena, Bandung.

“ Ini peringatan Zelfbestuur 100 tahun yang saya hadiri. Ini penting buat kita semua. Dan jangan lupa pendiri Republik ini, Bung Karno, muridnya Pak Said Tjokroaminoto," ungkap Akom sapaan akrab Ade Komarudin usai acara. Gagasan kebangsaan dan pentingnya menjadi bangsa merdeka sudah digerakkan oleh Tjokroaminoto dan para tokoh pergerakan lainnya di Tanah Air. Seperti diketahui, Tjokroaminoto memiliki banyak murid seperti Soekarno, Semaun, Muso, dan lain-lain.

Para muridnya itulah yang kemudian menjalankan gagasan-gagasan besar sang guru di kemudian hari hingga lahirnya Proklamsi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Seratus tahun lalu di Bandung, Tjokroaminoto sudah mengumandangkan zelfbestuur itu. "Saya merasa bahagia sekaligus bangga pada hari ini telah menjadi bagian dari sebuah acara penting untuk memperingati 100 tahun zelfbestuur Indonesia. Sebagai orang Sunda, saya merasa bangga karena pidato Haji Omar



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Said Tjokoaminoto itu disampaikan di Bandung," ujar Akom.

Gagasan besar Tjokroaminoto jangan hanya dikenang, lebih dari itu, perlu implementasi dan refleksi oleh generasi yang akan datang. Bung Karno adalah salah satu murid terbaik Tjokroaminoto yang menyampaikan pidato pembelaannya di pengadilan kolonial dengan judul Indonesia Menggugat. Menurut Akom, gugatan itu ditujukan terhadap sistem penindasan ala kolonial dengan mengeksploitasi manusia atas manusia.

Tjokroaminoto telah menjadi inspirasi

besar bagi Bung Karno. Ide dan militansinya diteruskan oleh para murid tercantanya. Syarikat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto menjadi kendaraan penggerak kesadaran kolektif bangsa waktu itu untuk merdeka. "Saya ingin Syarikat Islam kembali bangkit. Tidak boleh terpecah-pecah. Sekali lagi, saya sampaikan bangsa ini tidak akan lahir kalau Pak Tjokro tidak menjadi gurunya Bung

Karno," tegas Akom.

Ditambahkan Akom, sejarah hidup Tjokroaminoto memperlihatkan, seorang intelektual tidak boleh berdiri di menara gading, terpisah dari penderitaan rakyat. "Sejarah Pak Tjokro mengajarkan pada kita bahwa kaum terpelajar harus terlibat dalam proses sejarah perjuangan bangsanya, terlibat dalam dinamika perubahan, ikut andil dalam memperbaiki situasi sosial, berkomitmen untuk mencari jalan keluar dari krisis," ucap Akom menegaskan. ■

(rif/imp), Foto: Arief/for

Hak Bertanya dan Hak Interpelasi Merupakan Hak Anggota DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon mempersilahkan anggota DPR RI yang ingin menggunakan hak bertanya dan hak interpelasinya terhadap Presiden. Hal tersebut diungkapkannya menyusul pertanyaan wartawan atas adanya wacana dari anggota DPR RI, yang ingin mengajukan hak interpelasi atas permasalahan Kewarganegaraan Archandra, Mantan Menteri ESDM yang baru saja diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo kemarin.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

“ Hak bertanya dan hak interpelasi itu merupakan hak anggota DPR RI, silakan saja yang ingin mempergunakan haknya itu, kita tunggu. Jika ada dua puluh lima orang dan lebih dari dua puluh lima orang dan lebih dari dua fraksi ya bisa saja diajukan hak itu. Itu hak anggota. Namun apakah nanti hak itu perlu dilanjutkan atau tidak, nanti kita lihat,” ujarnya sesuai Sidang Paripurna DPR RI dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota

Keuangannya, di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (16/8).

Dilanjutkan Fadli, sampai saat ini hak itu memang jarang digunakan. Namun melihat kejadian tentang adanya menteri yang memiliki dua kewarganegaraan itu merupakan kejadian yang baru pertama kali terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara besar.

"Hak itu juga jarang digunakan. Ini kejadian baru pertama kali terjadi. Di sebuah negara besar tiba-tiba ada suatu

kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana ada menteri dengan dwi kewarganegaraan. Walaupun kita mendukung semangat untuk membawa orang-orang yang punya keterampilan dan keahlian yang ada di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air. Kalau saya pribadi sebenarnya mendukung Archandra, tapi masalah paspor dan kewarganegaraan ini kan masalah undang-undang. Ini masalah dalam proses rekrutmen, keteledoran dari Presiden sendiri," pungkasnya. ■

(gym), Foto: Azka/br

DPR RI Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Tokoh Berprestasi

Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan apresiasi kepada Presiden dan Wakilnya, beserta jajaran kabinet, atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dalam menjalankan roda pembangunan. Hal itu disampaikannya saat pidato rapat bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).



Pimpinan DPR RI saat sidang bersama DPR RI dan DPD RI

“ Bangunan peradaban demokrasi bangsa berdiri semakin kokoh dan telah berjalan jauh, demokrasi yang hidup dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif meningkat. Dalam konteks tersebut kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran kabinetnya,” ujar Ade Komarudin.

Ia juga mengajak segenap hadirin sidang bersama untuk memberikan apresiasi bagi para tokoh dan anggota

masyarakat teladan yang berprestasi.

"Kami memberikan apresiasi khusus bagi para tokoh dan anggota masyarakat teladan yang berprestasi, yang sebagian perwakilannya berada di balkon ruang sidang, dan sebagian lainnya menyaksikan dari Lobby gedung Nusantara III, IV dan V," ucap politisi F-Golkar itu.

Tokoh berprestasi yang dinominasikan dan dikoordinasikan tersebut terdiri dari berbagai Kementerian, yakni Kementerian Pertanian,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian agama, Radio Republik Indonesia, Peserta Terbaik Parlemen Remaja. ■

(dep/mp), Foto: Iwan/br

Ade Komarudin: Pemberian Remisi Pada Terpidana Korupsi Dinilai tak Bijak

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, terkait rencana pemerintah yang akan memberikan kemudahan remisi bagi terpidana kasus korupsi dinilainya kurang bijak.

“ Kalau mencuri handphone, mencuri ayam bolehlah dapat remisi, tapi untuk tiga hal narkoba, korupsi dan terorisme itu kurang bijaksana ya,” ujar Akom sapaan akrab Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/8).

Seperti diketahui, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam revisi itu, satu poin menyebutkan syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba dihilangkan.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Terpidana kasus tersebut bisa mendapatkan remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya. Salah satu alasan pemerintah merevisi peraturan itu karena lembaga pemasyarakatan yang ada sudah penuh.

"Memang *over capacity* terutama dari narkoba. Makanya saya bilang pemberantasan narkoba itu bukan hanya mengejar yang pakai narkoba tetapi harus ada langkah preventif, artinya gerakan nasional," kata Akom. ■

(rnm), Foto: Arif/br

Debirokratisasi dan Deregulasi Tetap Dilakukan Pemerintah

Debirokratisasi dan deregulasi tetap dilakukan pemerintah untuk menyambut 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah bergulir. Regulasi yang usang diperbarui untuk menyongsong perubahan zaman.

Demikian penegasan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Selasa (16/8). "Regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas," kata Jokowi.

Pemerintah, kata Presiden, telah menyiapkan 96 persen regulasi untuk mempercepat manfaat dari 12 paket tersebut. Bahkan, pemerintah



Presiden RI Joko Widodo

sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan

Kebijakan Ekonomi pada 28 Juni lalu. Pemerintah sendiri sudah mensinkronkan lebih dari 3000 Perda yang dinilai tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi penting dilakukan untuk membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Perda yang dibatalkan itu hanya yang menyangkut perdagangan dan investasi.

"Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan dan kesinambungan regulasi dari UUD 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berada di atas UUD 1945.

Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat," papar Jokowi lagi. ■

(mb), Foto: Rizka/br

DPR RI Ajak Masyarakat Semakin Giat Bekerja

Salah satu cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang paling fundamental, yaitu penciptaan kesejahteraan umum yang seluas-luasnya. Sang Proklamator, Bung Karno pun menegaskan bahwa 'Kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas, sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan besar dalam memajukan Republik Indonesia'.

Guna mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah anggaran negara yang berpihak pada prioritas-prioritas pembangunan, yang disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Ade Komarudin pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Rapat ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil-wakil Ketua DPR RI, Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Presiden dan Wakil Presiden RI ke-4 dan ke-5, hingga Ketua DPR RI periode 2004 hingga 2016.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, di berbagai belahan dunia, ekonomi sedang melambat. Negara-negara maju yang selama ini menjadi dinamo perekonomian dunia belum berhasil keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Semua ini menurunkan aktivitas perekonomian internasional dan menciptakan tantangan yang tidak mudah.

"DPR RI memahami semua itu dan mengajak seluruh rakyat untuk bekerja semakin giat agar situasi dunia yang sulit tidak berimbas negatif kepada perekonomian kita. Bahkan kita harus yakin, bahwa kesulitan selalu menciptakan kesempatan bagi mereka

yang aktif dan kreatif," kata Akom.

Untuk itu, pihaknya berharap bahwa anggaran yang diajukan oleh Presiden RI, adalah cermin dan kristalisasi dari tekad bersama untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada, sambil terus berusaha memajukan berbagai hal yang bersifat strategis.

"Anggaran negara bukanlah sekedar rangkaian angka-angka dan statistik, melainkan cerminan sikap kita, prioritas kita, bahkan filosofi kita dalam membangun Indonesia. Kita menambah



Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna RUU tentang APBN 2017 bersama Presiden RI

dan meningkatkan anggaran pendidikan bukanlah sekedar untuk memperbanyak sekolah, tetapi untuk membuka lebih banyak kemungkinan, agar anak-anak Indonesia menjadi cerdas, semakin berpengetahuan luas, serta semakin siap menghadapi kehidupan ini," imbuh politisi F-PG itu.

Demikian pula peningkatan dana pembangunan infrastruktur, Akom ingin memastikan bukan hanya sekedar untuk membangun jalan dan jembatan, tetapi untuk menciptakan lebih banyak kemungkinan agar Indonesia semakin menyatu, sehingga interaksi masyarakat lebih dinamis, dan dengan semua itu roda perekonomian kita mampu berputar lebih

cepat lagi.

"Dewan yakin bahwa dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, dengan kepemimpinan yang ikhlas dan kreatif, semua itu mampu kita lakukan dengan lebih baik lagi di masa mendatang," yakin politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Akom menambahkan, bentuk lain dari realisasi tujuan bernegara dalam hal memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memperbesar porsi layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pengelolaan laju pertumbuhan penduduk.

"Dalam konteks ini, Dewan memandang berbagai program Pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara umum telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala," kritik Akom.

Pada tahun ini, imbuh Akom, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara.

"Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Untuk itu, peran BKKBN perlu direvitalisasi agar laju pertumbuhan penduduk tetap terjaga," tambah Akom.

Akom memastikan, Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016-2017, akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 16 Agustus 2016, dan berakhir pada Jumat, 28 Oktober 2016 mendatang. ■

Pemerintah Diminta Ambil Langkah agar LKPP Dapat Opini WTP

Komitmen Pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu yang menjadi perhatian Dewan saat ini. Mengingat, pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dewan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar laporan keuangan Pemerintah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” dorong Ketua DPR RI Ade Komarudin pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I

Tahun Sidang 2016-2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Rapat ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil-wakil Ketua DPR RI, Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Presiden dan Wakil Presiden RI ke-4 dan ke-5, hingga Ketua DPR RI periode 2004 hingga 2016.

Akom, panggilan Ade Komarudin menambahkan, untuk menciptakan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel, Dewan memandang perlunya komitmen bersama antara Pemerintah dan Dewan untuk segera memberikan akses publik pada setiap proses pembahasan anggaran.

“Dewan bertekad akan merumuskan mekanisme pembahasan anggaran yang akuntabel dan partisipatif bersama dengan Pemerintah,” komitmen politisi F-PG itu.

Terkait pengawasan pelaksanaan



Suasana Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang APBN 2017

APBN, Akom memastikan pihaknya senantiasa mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan keuangan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Di sisi lain, politisi asal dapil Jawa Barat itu mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang telah melakukan perubahan susunan kabinet dengan lancar dan tanpa gejolak politik yang berarti.

“Dewan juga mengucapkan selamat bekerja kepada para Menteri yang baru dilantik. Kami semua yakin bahwa para menteri yang baru dilantik, serta semua jajaran kabinet, adalah putra dan putri terbaik

Indonesia yang siap memberikan dedikasi yang tulus demi kemajuan kita bersama,” harap Akom.

Akom menambahkan, isu pemberantasan korupsi telah menjadi agenda di fora antar-parlemen. Untuk itu, DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Workshop Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*.

“Pada kegiatan tersebut, Dewan akan mengajak anggota Parlemen negara lain untuk aktif menyuarakan dan menyebarkan semangat anti korupsi di negaranya masing-masing,” imbuhnya.

Akom memastikan, Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016-2017, akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 16 Agustus 2016, dan berakhir pada Jumat, 28 Oktober 2016 mendatang. ■

(9/7) Foto: Rizka/br

Gagasan Sekolah Sehari Penuh tak Menyentuh Persoalan Pendidikan

Kendati gagasan sekolah sehari penuh atau Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dibatalkan, gagasan ini tetap mendapat catatan kritis dari Anggota Dewan. Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai, gagasan ini tak menyentuh permasalahan pendidikan yang sebenarnya.

“Gagasan yang dilontarkan oleh Mendikbud itu tidak menyentuh secara langsung permasalahan pendidikan yang sebenarnya. Mendikbud tidak boleh berpikir persoalan yang dihadapi di Ibukota, lalu di generalisir dan diterapkan di seluruh Indonesia. Persoalan Jakarta itu beda dengan persoalan Indonesia secara keseluruhan,” katanya saat dihubungi Parlemen, Jumat (12/8).

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja DPR RI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan apresiasi atas kinerja DPR RI, saat pidato di depan Sidang Tahunan MPR tahun 2016, Selasa (16/8). Penghargaan diberikan atas peran DPR RI yang selama ini telah memegang amanah Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat," papar Jokowi dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan di Gedung Nusantara.

Jokowi menyampaikan, pada tahun 2016 ini, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 10 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang. Antara lain Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat dan Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara.

"Selain itu Undang-Undang



Suasana Sidang Tahunan MPR bersama Presiden RI

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, sebagai bagian dari upaya kemajuan dan kesejahteraan nelayan, serta sektor kemaritiman di tanah air," jelas Jokowi.

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran. Jokowi menyampaikan, DPR RI bersama pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang APBN 2017, dan RUU tentang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015.

berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program-program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," tandasnya.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, kata Presiden Jokowi, DPR RI telah mendorong optimalisasi pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta optimalisasi peran anggota dewan.

DPR RI juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan oleh pemerintah. "Alhamdulillah Kapolri, Pimpinan KPK dan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia semuanya telah dilantik dalam beberapa bulan terakhir ini," tutur Jokowi. ■

Menurutnya, masih banyak permasalahan lain yang melingkupi pendidikan di Tanah Air. Permasalahan pertama, masih adanya penempatan guru yang tidak merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, guru yang berkualitas baik kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, sedangkan guru-guru yang di daerah, malah kekurangan guru berkualitas. Seperti daerah-daerah yang berada di daerah 3T.

"Permasalahan pendidikan berikutnya yang mendesak bukan persoalan yang menyangkut *full day school* itu. Persoalan yang mendesak itu adalah bahwa sampai saat ini terjadi kesenjangan pendidikan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Ada *gap* yang sangat besar tentang pendidikan," imbuh politisi F-PDI Perjuangan itu.



Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan

Belum lagi, tambah Sofyan, masih adanya permasalahan infrastruktur yang harus diselesaikan. Misalnya, kondisi ruang kelas rusak di seluruh Indonesia yang mencapai angka 8 persen. Menurutnya, ini masalah pendidikan sebenarnya yang harus segera diselesaikan.

"Yang ingin kita bangun itu pendidikan di Indonesia, bukan di kota-kota besar saja, yakni soal pemerataan pendidikan. Apalagi yang disasar itu wajib belajar, yakni tingkat SD dan SMP. Anak harus menikmati pendidikan itu. Bukan berarti permasalahan di Ibukota itu ditempatkan secara nasional. Itu tidak bisa," tegas Sofyan.

Politisi asal dapil Sumatera Utara itu khawatir, akibat dari gagasan ini, mengakibatkan anak kehilangan keceriaan ketika bersekolah, karena menjadi beban berat. Namun, "Kita akan membahasnya dulu bersama Mendikbud, dan meminta penjelasan mengenai konsep itu. Kalau bagus, tentu kita dukung," tutup Sofyan. ■

Dewan Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Sudah Kekerasan Terhadap Guru

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati meminta pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyudahi praktik kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap guru. Hal ini terkait kekerasan yang menimpa Dasrul, guru SMK Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan. Dasrul mendapat penganiayaan dari wali murid, karena dirinya mengukuk murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah.

“ Saya mendorong Mendikbud, Kapolri, Jaksa Agung, KPAI, organisasi profesi guru dan *stakeholder* lainnya agar bertemu untuk menyamakan persepsi dan pandangan atas persoalan ini,” tegas Reni, dalam rilis yang dikirim kepada Parlemen, Jumat (12/8). Kasus penganiayaan ini sendiri sudah ditangani Polsek Tamalate, Sulawesi Selatan.

Menurut Reni, belakangan ini profesi guru sering menjadi obyek sasaran baik kekerasan fisik maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum. Kondisi ini menjadi preseden tidak baik untuk dunia pendidikan. Guru yang semestinya menjadi teladan dan panutan menjadi tidak memiliki marwah.

"Saya banyak mendapat keluhan kekhawatiran dari para guru atas fenomena kriminalisasi maupun aksi kekerasan fisik yang menimpa guru-guru. Kriminalisasi guru dan aksi kekerasan ini jangan dianggap sepele. Karena ini efeknya pada kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM)," ujar Reni.

Dalam sejumlah kasus yang mencuat, tambah Reni, aparat penegak hukum menjerat para guru dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi profesi guru juga diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sementara di Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 secara jelas bahwa guru berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja serta kesehatan kerja.

"Atas dua UU tersebut, sebaiknya seluruh *stakeholder* menyamakan persepsi

agar peristiwa yang muncul tidak terulang kembali," imbuh politisi F-PPP itu.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Langkah tersebut untuk menegaskan kehadiran negara memberikan perlindungan kepada guru. Langkah ini diharapkan dapat memutus praktek yang meresahkan guru.

"Langkah ini juga bentuk komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan berkesinambungan. Langkah ini sebagai bentuk sikap antisipatif dan preventif agar di waktu mendatang tidak terulang kembali," tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Anggota Komisi X Dadang Rusdiana juga menyayangkan sikap orang tua murid yang melakukan kekerasan terhadap guru akibat guru menghukum anaknya. Menurutnya, tindakan orang tua murid seperti ini adalah tindakan kebebasan dan pengatasnamaan HAM yang kebablasan. Dia pun mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.

"Seringkali guru ketika mendidik disertai penegakan disiplin seperti dengan mencubit atau menjewer dianggap sebagai kekerasan dan kemudian diikuti dengan balas dendam orangtua siswa, dengan melakukan kekerasan yang serupa atau melaporkan ke polisi. Ya itulah kebebasan dan pengatasnamaan HAM yang kebablasan," kata Dadang.

Politisi F-Hanura itu menambahkan, guru adalah orang berjasa dan

seorang pendidik. Sehingga, ketika murid hilang hormat, maka wajar bila guru memberikan sanksi. Pasalnya, murid sekarang hidup bukan dari dunia pendidikan saja. Para murid mudah terpengaruh dari banyak hal yang membentuk karakter mereka. Sehingga, tidak bisa disalahkan seorang guru karena perilaku muridnya.

"Siswa sekarang itu bukan hanya mendapat pendidikan di sekolah, dia juga mendapat pengaruh 'pendidikan tambahan' dari lingkungannya. Orangtuanya saja yang tidak paham makna mendidik. (Pemukulan) itu kasih sayang yang salah arah," tuturnya.

Karenanya, sambung politisi asal dapil Jawa Barat itu, komite sekolah yang ada harusnya bisa diberdayakan untuk menjadi sarana komunikasi sekolah dengan masyarakat. Sehingga sekolah sebagai ekosistem pendidikan benar-benar berjalan dengan baik. ■

(6/). Foto: A. Akbar/br



Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

Pemerintah Diminta Serius Tanggapi TKI Jadi Kurir Narkoba

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan TKI banyak yang dijadikan sebagai kurir narkoba. Data terakhir menunjukkan ada 36 orang TKI yang saat ini ditahan di Hongkong terkait kasus narkoba.

“Terlibat dalam bisnis dan pemakaian narkoba adalah kejahatan serius. Jika TKI kita tidak dilindungi dan diproteksi, bisa saja mereka akan menjadi sasaran empuk para mafia narkoba kelas internasional. Ini betul-betul sangat berbahaya,” kata Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Kamis, (11/8).

Politisi Partai Amanat Nasional itu, menuturkan sebagaimana di Indonesia, hukuman terhadap pengedar dan pemakai narkoba sangat berat. Tentu di negara lain pun, hukuman seperti itu diberlakukan. Jangan sampai pemerintah suatu waktu kehabisan energi untuk melindungi agar TKI tidak sampai dihukum berat.

"Selama ini, kita hanya bisa teriak

kencang kalau ada TKI yang mau dihukum gantung. Sementara, upaya untuk melindungi mereka agar tidak sampai kena hukuman seperti itu masih sangat kurang," tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan upaya konkrit agar TKI kita tidak semakin banyak yang dimanfaatkan mafia narkoba.

'Perlu dirumuskan

langkah-langkah antisipatif. Termasuk, mengawal TKI kita yang habis izin dan masa tinggalnya. Disamping itu, mengawal para TKI yang hendak kembali ke tanah air," tegas Saleh Partaonan Daulay politisi dari Dapil Sumut II. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

(as), Foto: Arif/br

Pidato Presiden Kontradiktif dengan Realitas

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai pidato Presiden Jokowi mengenai RAPBN 2017 terkesan kontradiktif dengan hal yang terjadi sekarang ini. Hal itu diungkapkan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pidato RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (16/8).

“Saya di Komisi IX, yang beliau katakan adalah kontradiktif dengan hal yang terjadi sekarang, meskipun jika saya menyimak tadi nampaknya Pak Jokowi paham betul bahwa kapasitas dan meningkatkan SDM adalah sesuatu yang perlu,” ujarnya.

Misalnya di saat bicara pengangguran, justru yang terjadi adalah tenaga asing yang membanjiri proyek pembangunan di Indonesia. Ia pun menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Pasalnya, tenaga asing kini sudah cukup banyak dan dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan tenaga lokal.



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

"Misalnya pengangguran, di lain pihak beliau justru membolehkan tenaga asing membanjiri proyek di Indonesia. Saya melihat itu bagus diatas kertas, dan untuk pelaksanaannya perlu dikawal," tuturnya.

Politisi PPP ini menegaskan akan terus mengawal pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Karena dalam pidato tersebut, Presiden mengatakan masalah kesehatan dan pendidikan yang menjadi utama. "Saya sendiri akan terus mengawal soal kesehatan. seperti sejauh apa revitalisasi rumah sakit, puskesmas dan sejauh apa masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan. Karena tadi beliau bilang masalah kesehatan dan pendidikan yang diutamakan," pungkasnya. ■

(asmp), Foto: Jayadi/br

Perlu Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Menanggapi Pidato Presiden dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2016, Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan negara memerlukan penegakan hukum yang berkeadilan terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“ Pidato Presiden bagus karena memberikan penjelasan apa yang telah dilakukan Presiden selama ini, apa hasilnya beserta langkah-langkah ke depannya. Saya sebetulnya menunggu apakah pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas, tetapi tadi hanya dibahas sepintas,” tutur Nurhayati usai mendengarkan Pidato Presiden di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Selain memberikan apresiasinya terhadap pidato Presiden, politisi dari Fraksi Demokrat itu menjelaskan bahwa sebaiknya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk ke depannya.

"Saya menunggu Presiden memaparkan bagaimana sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, tapi tadi hanya disebutkan tentang penangkapan kelompok teroris Santoso. Mengingat Indonesia

merupakan negara hukum, saya kira penting untuk memasukkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum, ini masukkan saja buat Presiden," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai stabilitas politik dan atmosfer dalam partai politik selama setahun terakhir Pemerintahan Jokowi ini, Nurhayati menilai bahwa sejauh ini Presiden mampu mengatasi dinamika yang ada.

"Dinamika dalam demokrasi itu selalu ada dan saya kira Pak Jokowi mampu mengatasinya. Kalau ada masalah atau perbedaan pandangan, demokrasi harus terus ditegakkan dan dihargai. Partai politik itu kan fungsinya untuk *check and balances* bukan untuk saling menjatuhkan apalagi saling adu domba, ini yang tidak baik," imbuh Nurhayati yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). ■



Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

(anna.mp), Foto: Rizka/br

Upacara HUT RI, Sekjen DPR RI Tekankan Kedisiplinan Pegawai

Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan, Setjen DPR RI sebagai institusi akan terus menjalankan proses reformasi birokrasi yang dilakukan sejak 2008. Hal itu disampaikan usai melakukan upacara HUT RI ke 71 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (17/8).

“ Kita dalam proses membangun reformasi birokrasi sejak 2008, ada pedoman dan standar khusus. Dan ini harus dijalankan. Memang tidak mudah dalam membangun SDM, mengubah *mindset*, bagaimana kerja cepat dan hasilnya terukur. Ini yang perlu digalakkan,” ujar Win, sapaan akrabnya.

Ia pun menegaskan, kepada pegawai untuk dapat bekerja cepat dan terukur. "Semua yang bisa



Suasana Upacara Setjen DPR RI dalam rangka peringatan HUT RI ke 71

dikerjakan hari ini ya harus dikerjakan hari ini. Karena besok tantangannya beda lagi dan tidak akan terulang,” sambungnya.

Mengenai kedisiplinan, Win mengatakan hal itu bisa dimulai dari diri sendiri, harus ada kemauan keras dalam membangun mental dan moral dengan baik sesuai nilai luhur bangsa Indonesia. "Jadi kedisiplinan itu dimulai dari diri sendiri. Sehingga misalnya kalau terlambat datang ke kantor bisa

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Masih Cukup Tinggi

Pemerintah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 5,3 persen. Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menilai, perkiraan ini masih cukup tinggi. Menurutnya, perlu usaha yang lebih ekstra dari Pemerintah untuk mencapai target tersebut.

“Kondisi kedepan penuh dengan tantangan. Target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dapat kita raih, tetapi tentu dengan *effort* yang lebih,” katanya, usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Jika dikaitkan dengan paket kebijakan ekonomi yang selama ini dikeluarkan oleh Pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi, Willgo menilai langkah yang diambil Pemerintah sudah cukup baik. Namun, implementasi dari 12 paket kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.

"Paket kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah, relatif dalam implementasinya masih sulit kita katakan

tercapai atau sukses untuk mendorong apa yang dimaksud daripada tujuan Pemerintah. Tidak perlu terlalu banyak paket, tetapi yang



Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar

merasa malu, melakukan korupsi membuat diri sendiri menjadi malu. Korupsi itu kan bisa dari skala kecil, itu bisa dihindari," paparnya.

"Jadi kita harus berkemauan keras membangun mental dan moral kita dengan baik sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia," sambungnya.

Ia pun mengatakan agar dapat meniru kerja keras pahlawan bangsa yang bekerja dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi bangsa dan negara. "Pahlawan bangsa kita luar biasa kerja keras, tulus ikhlas mengorbankan pribadi demi bangsa dan negara. Jadi itu yang harus dijaga, semisal apa sih yang kita berikan untuk bangsa dan negara," pungkasnya. ■

(hs) Foto: Andri/br

penting adalah kebijakan itu efektif dalam implementasinya, dan perlu dievaluasi," tegas Willgo.

Willgo juga mengingatkan agar paket kebijakan itu dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pengentasan kemiskinan.

Target pendapatan negara juga menjadi sorotan politisi F-Gerindra itu. Sebagaimana diketahui, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Menurutnya, ini membutuhkan *effort* yang tinggi. Mengingat, target pendapatan negara dari tahun 2015 hingga sekarang, belum tercapai.

"Ini juga akan menjadi catatan tersendiri. Kita tidak ingin membuat target tinggi, tetapi tidak bisa tercapai. Sehingga pemerintah dianggap kurang kredibel bila target tidak tercapai," sorot Willgo.

Politisi asal dapil NTB itu juga

mengkritisi pemotongan anggaran APBN 2016 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp 133 triliun. Menurutnya, hal ini membuat belanja pemerintah menurun. Padahal, belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi agak paradoks, pertumbuhan ekonomi kita dipatok sebesar 5,3 persen, sementara belanja kita turun," heran Willgo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan RAPBN 2017, Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar 13.300 per dolar Amerika Serikat.

Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar

Amerika Serikat per barel.

Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun. Penerimaan negara bukan pajak 2017 ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun. Sementara belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun yang terdiri belanja pusat Rp 1.310,4 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp 760 triliun. Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 322,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB. ■

(ams/), Foto: Kresna/br

Proyek 35 Ribu MW Listrik Masih Sulit Terwujud

Mega proyek 35 ribu megawatt untuk atasi defisit listrik masih sulit terwujud karena alasan politis dan perencanaan yang belum matang. Program Indonesia Terang yang ingin mencapai target elektrifikasi 97 persen juga belum merata dilakukan di semua daerah.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo saat ditemui Parlementaria, Rabu (17/8), di ruang kerjanya. Pernyataan Mukhtar ini sebagai



Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo

refleksi atas Pidato Presiden Joko Widodo di sektor energi, terutama menyangkut pengadaan listrik.

"Belum ada pernyataan *spirit* dari pemerintah bahwa proyek ini bisa terwujud. Saya berharap Presiden urun rembuk dulu dengan kementerian teknis, yaitu ESDM dan PLN. Matangkan dulu. Jangan gegabah membuat *planning*," ujar politisi Partai Hanura ini.

Menurut Mukhtar, mungkin saja pertimbangan pemerintah benar, ingin membangun proyek 35 ribu MW, karena melihat kebutuhan energi listrik di daerah. Tapi, kalau kementerian ESDM dan PLN menyatakan sulit terwujud, tentu sulit juga bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Apalagi, masih ada persoalan politis di internal kabinet soal ini. Antar menteri sendiri masih silang pendapat.

"Kalau tidak terwujud, kan malu. Bagi saya mimpi, kalau kabinetnya tidak kompak soal proyek ini. Kalau kementerian teknis dan PLN mengatakan tidak bisa, mau bagaimana lagi. Komisi VII sendiri sudah sering mengkritisi proyek tersebut. Saya sempat berharap Menteri ESDM yang baru bisa bahas ini. Ternyata, baru 20 hari menjabat sudah dicopot," papar mantan Anggota DPRD Provinsi Sulsel itu.

Sementara mengomentari program Indonesia Terang yang ingin menysasar 12.659 desa atau setara 300-500 MW, politisi dari dapil Sulsel I ini mengatakan, pengadaan listrik di daerah terpencil masih jauh dari harapan. Di dapilnya sendiri, banyak desa belum terakses listrik. Bahkan, di NTT banyak desa yang sangat tertinggal dan sampai kini belum mendapat penerangan listrik. ■

(s), Foto: Jaka/br

Dewan Minta Pemerintah Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mendesak Presiden Jokowi untuk segera menunjuk Menteri ESDM definitif. Pasalnya, dengan belum adanya penunjukan Menteri ESDM yang baru tersebut, dinilai berpotensi menghambat pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016 ini.

“Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi,” jelas Rofi pasca mendengarkan Pidato Presiden Jokowi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, di Komplek Gedung DPR RI, Selasa (16/8).

Sebagaimana diketahui, Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi, pada Senin (15/8) malam. Posisi menteri yang kosong tersebut untuk sementara

dirangkap oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas (Plt), yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Anggota Panja Migas ini yakin bahwa posisi definitif Menteri ESDM tersebut diperlukan dalam menyusun kerangka asumsi makro ekonomi di bidang energi.

"Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjuk Menteri ESDM tentu tetap harus



Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar

mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya," papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, jika Presiden Jokowi tidak segera menunjuk Menteri ESDM definitif yang baru, akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Seperti, program

35.000 MW, kenaikan *lifting* migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progress renegotiasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara.

"Terakhir, Komisi VII minta agar kejadian pemberhentian menteri kemarin tidak terulang kembali," tegas Rofi.

Berdasarkan nota keuangan, Pemerintah menyampaikan asumsi makro

untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US\$ 45 per barel. Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari. ■

(sc). Foto: detik/hr

Dewan Prihatin Kasus Pemukulan Guru SMKN 2 Makassar

Pemukulan kepada Dasrul, seorang guru SMK Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan, oleh wali murid, beberapa waktu lalu, mengundang keprihatinan Anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakhri mengungkapkan kesedihannya saat mendengar kasus pemukulan itu.

“ Saya sedih mendengar kasus pemukulan itu. Proses belajar mengajar harus dikotori oleh nafsu angkara murka orang tua,” prihatin Fikri, dalam pesan singkatnya kepada Parlemen, Jumat (12/8).

Politisi F-PKS itu menilai, ini buntut dari kasus Samhudi, seorang guru SMP Raden Rahmat di Sidoarjo, Jawa Timur. Samhudi dilaporkan oleh wali murid, yang diduga mencubit muridnya, karena tidak menjalankan shalat Dhuha.

"Ini masalah kepercayaan. Bila sekolah sudah dipercayai oleh wali murid untuk mendidik anaknya, mestinya semua proses dalam sekolah, harus dimaknai sebagai proses pendidikan," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwo Kore menyesalkan terjadinya kasus pemukulan terhadap guru Dasrul. Kasus seperti ini pun turut menjadi perhatian Komisi X yang membidangi pendidikan. Untuk itu, ia mengusulkan dibuatnya undang-undang untuk melindungi guru.

"Perlu ada UU Perlindungan Guru. Ini penting. Konsepnya guru diberi hak untuk mendisiplinkan murid, tapi diatur juga agar tidak boleh mencederainya," jelas Jefri.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakhri

Politisi F-PD itu menyatakan, dengan adanya landasan hukum itu, nantinya akan ada pakem jika ada masalah yang melibatkan antara guru dengan murid, serta guru dengan orang tua atau wali murid.

"Ini kan demi pendidikan murid juga. Saya juga mengajak Anggota Dewan lain untuk mendukung UU Perlindungan Guru ini," harap Jefri.

Jefri juga setuju bahwa dalam mendidik murid di sekolah, guru tidak

boleh ringan tangan. Apalagi sampai mencederainya. Jefri selalu mendukung pendisiplinan siswa selama tidak dengan kekerasan.

"Kita juga tidak mau anak-anak dipukul guru sampai cedera, tapi kita juga tidak mau anak-anak dilepas begitu saja. Kadang orang tua berlindung pada hak asasi anak-anak. Kan untuk membangun anak perlu ada pengembangan karakter yang baik. Kita kan tidak mau anak-anak jadi tidak disiplin," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemukulan Dasrul oleh wali murid, Adnan Putra berawal dari sang anak, AS yang diduga ditampar oleh Dasrul

karena berkata kasar setelah diperingati akibat tak mengerjakan PR. Dasrul mengalami luka-luka memar di wajah, mulut dan hidungnya juga berdarah.

Kasus pemukulan itu mendapat aksi protes dari ratusan siswa, alumni, dan guru-guru di Makassar. Mereka melakukan *long march* dari SMK Negeri 2 Makassar ke Kantor Polsek Tamalate untuk menuntut pelaku pemukulan Dasrul dihukum berat. ■

(sf). Foto: detik/hr

HUT RI Momentum Hadapi MEA

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan, pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus adalah momentum untuk meningkatkan nasionalisme ditengah berbagai persaingan global. Hal itu disampaikan usai melakukan upacara HUT RI ke 71 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (17/8).

“ Momentum upacara ini penting karena kita baru saja memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kita harus siap menghadapi berbagai persaingan global. Kita harus sadarkan generasi muda dan semua pemimpin bangsa ini. Inilah momen yang harus kita manfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, Win sapaan akrabnya menuturkan, HUT RI ini sebagai momentum untuk menyatukan berbagai elemen, seiring dengan persaingan global yang tidak bisa dihindari.

"Indonesia harus bergerak cepat karena persaingan itu luar biasa. Ini juga momen penting untuk menyatukan. Kemarin kita mendengarkan pidato Presiden, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI juga

semangatnya adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan menyingkirkan



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

perselisihan," terangnya.

Ia pun juga menegaskan bahwa

konflik yang terjadi harus diberikan solusi dan dicarikan persatuan untuk saling memperkuat. "Saat pidato Presiden kemarin dikatakan, konflik itu harus disolusikan dan dicari persatuan untuk dikuatkan," sambungnya.

Win juga mengatakan Indonesia tidak bisa lagi memelihara egoisme sektoral. Sehingga elemen bangsa harus bisa menyatukan, terlebih kini usia kemerdekaan sudah memasuki 71 tahun. "Kita tak bisa lagi pelihara egoisme sektoral, kita harus bisa menyatukan persatuan bangsa. Dan ini sudah 71 tahun Indonesia merdeka masih banyak permasalahan yang dihadapi bangsa," jelasnya.

Sekretariat Jenderal DPR RI, menurut Win sebagai pintu pelaksana dalam berbagai pembuatan regulasi harus lebih punya komitmen dan konsisten dalam segala pekerjaan disegala level dan arahnya dalam kontribusi pembangunan bangsa di era persaingan.

"Dalam skala yang lebih kecil, Setjen DPR RI sebagai pintu pelaksana untuk melaksanakan berbagai regulasi harus lebih punya komitmen dan konsisten di dalam segala pelaksanaan pekerjaan disegala level arahnya untuk kontribusi dalam pembangunan bangsa," pungkasnya. ■

(b), Foto: Kreanib/br

Kopi Indonesia Berkelas Internasional

Komisi IV DPR RI menggelar audiensi dengan Coffee Lovers Indonesia (CLI) dan Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI), membahas kebijakan dan langkah-langkah pengembangan agribisnis Indonesia, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron, didampingi Anggota Komisi IV Sudin (F-PDIP) dan Sulaiman L Hamzah (F-NASDEM). Dalam sambutannya Herman Khaeron mengatakan bahwa kopi Indonesia adalah kopi berkelas internasional yang bisa jadi kebanggaan bangsa Indonesia.

"Ini bisa jadi semangat baru,

bahwa sesungguhnya kopi Indonesia adalah kopi berkelas Internasional, dan mestinya bisa lebih dibanggakan oleh masyarakat Indonesia," ujar Herman Khaeron.

Ia juga menyatakan, Komisi IV sudah mengembangkan komoditas kopi di beberapa lahan, baik milik Perhutani maupun di lahan milik masyarakat. Berdasarkan informasi dari Perhutani, penghasil kopi terbesar justru di kawasan Perhutani.

Tinggal mencari solusi bagaimana membangun interkoneksi bisnisnya, agar bisa dihubungkan dan dijalankan secara bersama.

"Kita akan merespon terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan pecinta kopi, dan kalau nanti dihasilkan suatu rencana strategis ke depan, baik berupa aksi sosial maupun diseminasi tentang kopi, tentu DPR RI akan dukung sepenuhnya," tandasnya.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Kopi memiliki peranan tersendiri untuk negara Indonesia, yakni sebagai pendapatan bagi 2 juta petani kopi, penyumbang devisa ke 4 terbesar dari sektor pertanian setelah CPO, karet dan Kakao, sebagai pelestarian lingkungan hidup (konservasi DAS), berkontribusi besar terhadap kenyamanan iklim mikro dan makro serta penyerapan CO₂, dan memberikan lapangan kerja

dan pendapatan.

Salah satu isu yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah mengenai naiknya tingkat konsumsi kopi didalam negeri, namun dari segi produksinya stagnan, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Indonesia termasuk tiga besar negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam, tetapi secara produksi dan profit masih dibawah kedua negara tersebut, padahal Indonesia memiliki lahan yang lebih luas. ■

(dhp.mp), Foto: Naefuraji/br

Pidato Presiden Belum Gambarkan Realitas

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani menilai pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Selasa, (16/8) belum menggambarkan realitas. Ia mengatakan ada beberapa hal seperti kinerja ekspor, layanan BPJS, investasi luar negeri serta pertumbuhan tenaga kerja masih menuai persoalan di masyarakat.

“ Meskipun yang disampaikan Presiden untuk beberapa sisi tidak menggambarkan realitas. Misalnya, bulan Juli ini adalah ekspor terendah dalam sejarah ekspor kita. Itu menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kita belum cukup pulih akibat dari lesunya perekonomian dunia internasional,” ujarnya usai menghadiri sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, dalam konteks pertumbuhan tenaga kerja, Muzani menjelaskan hal itu masih terlihat rendah kinerjanya, terbukti masih maraknya PHK di berbagai tempat. "Pertumbuhan tenaga kerja masih rendah bahkan masih terjadi PHK dimana-mana," sambungnya.

Dalam hal investasi luar negeri, Politisi Gerindra itu mengatakan hal itu belum cukup menggairahkan meskipun sudah ada 12 paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. "Investasi luar negeri juga masih belum cukup menggairahkan kita. Meskipun sudah ada 12 paket

kebijakan yang disiapkan Presiden Jokowi, tapi 12 paket itu belum cukup memberikan gairah investasi baru," terangnya.

Di bidang infrastruktur, Muzani memandang beragam gagasan pembangunan infrastruktur pemerintah juga tersendat karena tidak ada dana dan serapan yang rendah. "Infrastruktur yang digagas Presiden sekarang juga mandek karena tak ada uang, serapan anggaran rendah. Presiden hanya menggambarkan *success story* yang dilakukan pemerintah," ujar Muzani.

Dalam hal BPJS, lanjut Muzani, masih terjadi persoalan yang belum diselesaikan pemerintah. Meskipun jumlah pengguna BPJS terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan yang meningkat pula. "Termasuk bagaimana



Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani

dalam hal BPJS Kesehatan, makin banyak pemegangnya tapi untuk melayani pengguna jasa BPJS makin terbatas," lanjut Muzani.

"Sehingga orang mengantri cukup panjang, mau operasi pun lama karena harus bergiliran dengan orang banyak. Ini kan jadi *problem*," pungkasnya. ■

(dhp.mp), Foto: Arif/br

Anggota DPR RI Dukung Presiden Berhentikan Archandra

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mendukung keputusan Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar.

Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (16/8) di gedung Nusantara, Senayan Jakarta.

"Saya mendukung keputusan Presiden karena melihat Menteri ESDM mengalami permasalahan dari aspek legalitas. Hal ini untuk menjaga agar kabinet kerja ke depan lebih bagus. Apapun yang terjadi itu merupakan masukan ke arah yang lebih baik lagi," ungkap Satya.

Sementara penunjukan Menteri Koordinator (Menko) Maritim, Luhut B Panjaitan sebagai PLT (pelaksana tugas) Menteri ESDM merupakan langkah yang baik mengingat kementerian ESDM ada dibawah kordinasi Menko Maritim. Sehingga hal itu memang merupakan Tupoksi dari Menko Maritim.

Meski demikian, lanjut Satya, yang harus dicermati adalah bagaimana Menko Maritim ini selaku Plt untuk meneruskan

kebijakan energi nasional. Karena saat ini Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM telah membicarakan kebijakan energi nasional secara detil dan rinci. Hal itu ditandai dengan adanya rancangan umum energi nasional.

"Sekarang bagaimana Plt Menteri ESDM ini dapat meneruskan kebijakan energi nasional. Saya yakin eselon satu kementerian ESDM juga sangat paham hal itu. Namun bagaimana kemudian PLT Menteri ESDM yang mewakili

Presiden atau pemerintah menentukan prioritas-prioritas, dan langkah yang mesti ditempuh dalam program jangka pendek kementerian tersebut," papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Program jangka pendek yang dimaksud tersebut seperti divestasi saham Freeport yang saat ini belum selesai proses negosiasinya, identifikasi kelemahan program 35 ribu watt

yang harus segera diatasi. Serta mengevaluasi investasi bidang minyak dan gas bumi, di saat harga minyak yang sedang berada di bawah ini, dan membutuhkan eksplorasi yang cukup tinggi. ■



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha

(ayu), Foto: Iteanu/br



Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah

DPR RI Ingin Pembangunan Dilakukan Secara Seimbang

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menginginkan agar pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dilakukan secara merata dengan seluruh sektor, tidak hanya fokus dalam sektor tertentu saja. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan pidato Presiden tentang RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (16/8).

Anggota DPR RI Apresiasi Presiden Berhentikan Menteri ESDM

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah yang tepat dan patut diapresiasi terkait pemberhentian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar setelah perdebatan soal status kewarganegaraan.

“ Ini menunjukkan bahwa Presiden sangat mengerti, walaupun beliau tahu pak Archandra memiliki kemampuan yang luar biasa dan dibutuhkan tetapi karena memang kondisi hukumnya tidak sesuai, beliau mengambil sikap yang luar biasa,” ujar politisi Partai Golkar itu sebelum sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR RI, Selasa (16/8).

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena adanya suatu informasi yang tidak sampai sepenuhnya kepada Presiden, maka dari itu ke depan perlu ada perbaikan kinerja pada staf untuk lebih teliti dalam hal yang penting dan sensitif seperti itu.

Ia menjelaskan yang perlu diperbaiki mulai dari rekrutmen hingga proses mendalam. Menurutnya jangan terlalu tergesa-gesa dalam menentukan posisi menteri. “Karena dulu zaman Pak Harto saja kalau mau jadi anggota dewan

memakan waktu berbulan-bulan apalagi ini untuk posisi menteri,” tuturnya.

Dia mengakui memang Archandra memiliki kemampuan yang dibutuhkan Indonesia saat ini, akan tetapi ada juga

lain yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Masalah ini Dave tidak bisa menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab

karena yang lebih berhak menentukan siapa yang bersalah adalah Presiden.

“Saya tidak bisa menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab, Presiden yang lebih berhak menentukan siapa yang bersalah, akan tetapi beliau sudah mengambil sikap yang luar biasa dan sudah bertanggung jawab dengan segera menggantikan posisi Menteri ESDM tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengakui bahwa Menteri ESDM Archandra Tahar memiliki dua paspor, Amerika Serikat dan Indonesia.

Setelah ditelusuri Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM kemudian menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan sebagai pejabat sementara Menteri ESDM sampai diangkat Menteri ESDM definitif. ■



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno

(rnm.mp), Foto: Nagfuzji/br

“ Soal RAPBN 2017 saya pikir masih perlu ada maksimalisasi atau penyeimbangan. Ketika mau mengedepankan infrastruktur sebagai prioritas, saya pikir juga harus seimbang dengan sisi yang lain. Saya harapkan seperti itu,” jelasnya.

Terkait RAPBN 2017, ia pun juga mengkritik secara angka yang belum ada optimalisasi. “Sebenarnya sudah bagus, cuma kalau mau dikritik itu secara angka masih belum optimal. Karena ketika kita mengedepankan ketahanan pangan, perlu juga disiapkan dari segi infrastruktur,” sambungnya.

Hal ini menurutnya dimaksudkan agar kemajuan yang dihasilkan pembangunan tidak pincang dan dapat seimbang. “Kita harapkan perkembangan dan kemajuan itu tidak pincang

dan dapat dilakukan bersamaan,” ujar Politisi PKB ini.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Paripurna kali ini, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan,” ujar Jokowi.

Bagi Siti, ke depan pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek lain dalam proses pembangunan agar dapat saling merata dan tidak hanya sektor tertentu saja yang mengalami kemajuan. ■

(bs.mp), Foto: Jayadi/br

Target Pendapatan Negara Rp 1.737,6 Triliun

Dalam pidato RAPBN 2017 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan target pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp240,4 triliun.

Presiden menyampaikan hal tersebut di hadapan rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU RAPBN 2017 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8). "Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun," papar Jokowi.

Presiden menyebut kebijakan fiskal 2017 masih bersifat ekspansif yang diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dengan target defisit anggaran



Presiden RI Joko Widodo

dalam RAPBN 2017 mencapai Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Di sisi lain, kebijakan pembiayaan pemerintah

tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif, sekaligus juga meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Masih dalam konteks pembiayaan, pemerintah juga memberi perhatian pada program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Presiden dalam pidatonya juga ingin membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara luas. Pihak swasta akan dilibatkan

pula dalam pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. ■

(mb) foto : macfaruji.br

DPR RI Terpilih Tuan Rumah Sidang ke-9 AIPA Caucus

DPR RI terpilih menjadi tuan rumah Sidang ke-9 AIPA Caucus yang akan diadakan tahun 2017 mendatang. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno AIPA Caucus yang berlangsung di Luang Prabang, Laos, Kamis (11/8) lalu. Usai sidang, Anggota Delegasi DPR RI Sartono (F-PD) mengatakan, sejumlah isu penting akan menjadi sorotan dalam sidang di Indonesia nanti.

“ DPR RI akan membawa isu-isu yang relevan untuk dibahas parlemen AIPA nantinya. Kami sangat menyadari bahwa selama ini AIPA terus menjadi organisasi yang vokal dan krusial dalam mendukung visi-misi ASEAN,” kata politisi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Saat diskusi mengenai implementasi *Convention on Illegal Wildlife Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Anggota Delegasi DPR RI, Mahfuz Sidik (F-PKS) menyampaikan adanya revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang akan meningkatkan sanksi kepada para pelaku perdagangan *illegal* satwa liar.

Masih dalam kesempatan sidang,

Delegasi DPR RI juga mengapresiasi pembentukan ASEAN *Senior Official's Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yang secara signifikan telah menempatkan perdagangan satwa liar dan kayu dengan kejahatan lintas negara besar lainnya seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme dan penyelundupan senjata.

Sementara saat acara penutupan, Sekretaris Jenderal AIPA, Periowsamy Otharam juga menyampaikan inisiatif pembentukan *Joint Working Group* antara ASEAN dan AIPA yang akan memperkuat harmonisasi legislasi di kawasan ASEAN.



Tim Delegasi BKSAP DPR RI dalam sidang ke-9 AIPA Caucus

Acara penutupan rangkaian AIPA Caucus diadakan di *Arts Center Room*, Luang Prabang View Resort dan dihadiri oleh 44 anggota parlemen dari kawasan ASEAN dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN, USAID dan Freeland International. ■

(hsap.s7) Foto: adk.BKSAP/br



Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltara

Komisi IV Berkomitmen PPI Nunukan Bisa Diselesaikan

Komisi IV DPR RI berkomitmen agar Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nunukan bisa diselesaikan, sebab dengan adanya pelabuhan rakyat ini akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

“Harus ada *political will* yang kuat dari Pemerintah terhadap daerah perbatasan. Di Nunukan ada salah satu lokasi pembangunan pelabuhan pendaratan ikan, namun proyek ini terhenti (mangkrak). Dalam Raker dengan Kementerian KP akan saya pertanyakan, sebab dengan pelabuhan ikan maka akan memudahkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya,” tandas anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin ketika bersama Komisi IV mengunjungi Nunukan baru-baru ini.

Dia juga berharap, pelabuhan pendaratan nanti bisa dilengkapi dengan mesin pendingin sehingga hasil tangkapan ikan bisa bertahan lama termasuk bisa diekspor ke Malaysia. "Dengan demikian tidak sekedar pelabuhan, tetapi juga sebagai pusat mendinginkan ikan," katanya.

Berdasarkan informasi, lanjut Andi, mangkraknya proyek pelabuhan ini karena keterbatasan kesediaan listrik, maka Bupati Nunukan mengusulkan supaya di Nunukan ini perlu disediakan kapal listrik atau kapal listrik terapung sehingga mesin pendinginnya berfungsi dengan baik.

Di sisi lain, kata Andi Pasluddin, anggaran Kementerian KP dipotong cukup besar. Karena ini merupakan program prioritas maka Komisi IV akan mendorong agar proyek ini segera diselesaikan. Karena APBN Perubahan 2016 sudah disahkan, maka dia

mengusulkan bisa masuk pada anggaran 2017 dan setelah reses pada pertengahan Agustus Komisi IV siap membahasnya.

Ditanya mengenai saran yang disampaikan Komisi IV, potensi Kaltara khususnya Nunukan selain perikanan maka sektor pertanian dan perkebunan bisa dikembangkan. Dengan demikian, ke depan Nunukan bisa menjadi daerah yang bisa menyuplai kebutuhan pokok ke negeri jiran Malaysia, bukan seperti sekarang Nunukan banyak dipasok kebutuhan sehari-hari dari Malaysia.

Kita ingin warga Malaysia juga mau menerima barang-barang dari Nunukan seperti ikan dan hasil pertanian lainnya. Kita harus ubah kondisi yang selama ini impor, bisa ekspor barang-barang kita melalui Nunukan," ia menegaskan.

Kaitannya dengan DPR RI yang membentuk Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan, politisi PKS ini menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar Dewan lebih intens dan lebih kuat mengawasi program-program pemerintah untuk memberdayakan daerah perbatasan. ■

(mp), Foto: Mastur/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI dan Menkominfo serta disaksikan oleh Sekjen DPR RI, membuka pameran Filateli DPR dengan tema "Politik dalam Prangko" di Gedung DPR RI, Kamis (18/8) Foto : Andri/hr

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menyelenggarakan pengobatan gratis di Balai Kampung Karang Geneng Utara, Semarang, Sabtu (13/8) Foto: Iwan



Setjen DPR, MPR, dan DPD RI menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Gedung DPR RI, Rabu (17/8) Foto: Jayadi



Biro Pemberitaan Parlemen diwakili Bagian Penerbitan, rapat dengan Manajemen Angkasa Pura II, terkait penempatan rak display dan perijinan serta distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bandara Soetta, Jumat (19/8)

